

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah

Heru Eko Prasetyo

heruekoprasetyo.untag@gmail.com

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Abstract

This study aims to determine the effect of economic growth and local original income on the level of regional financial independence in the Central Java Province in 2016 - 2018. The population in this study are all districts in Central Java Province. While the sample used is the Regency in Central Java Province totaling 29 (twenty nine) Regencies. The sampling technique in this study using the Census sample that is all populations are sampled. This study uses multiple linear regression analysis.

The results of the study are the first hypothesis statement is expected that economic growth has a significant effect on the level of Regional Financial Independence, not proven. Statistical test results show a significant level of economic growth of 0.911, which means greater than a significant level of 0.05 ($0.911 > 0.05$). This proves the results of research that economic growth has no significant effect on the level of Regional Financial Independence. The second hypothesis statement is expected that regional own-source revenue (PAD) has a significant effect on the level of Regional Financial Independence. The results of statistical tests show a significant level of regional original income of 0,000, which means it is smaller than the significant level of 0.05 ($0,000 < 0.05$). This proves the results of the study that local revenue has a significant effect on the level of financial independence.

Keywords: *Economic Growth, Local Own Revenue, Level of Regional Financial Independence.*

1. Pendahuluan

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2014). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan.

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai pendapatan asli daerah setiap propinsi, kabupaten relatif tidak banyak berubah. Setelah desentralisasi fiskal digulirkan oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah berlomba-lomba menciptakan kreatifitas baru untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah, karena PAD merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna serta upaya yang sungguh-sungguh dari pemda untuk meminimalkan ketergantungan kepada pusat (Rahmat, 2010). Sektor pendapatan sangat labil atau faktor ketidakpastian akan penerimaan dari Pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih memprihatinkan pada daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah rendah. Dengan PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih

Edisi Oktober

tinggi. Pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. (Abdul Halim, 2014).

Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) dalam perkembangannya, mengalami banyak kemajuan, sehingga diharapkan mampu memacu perkembangan daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kemampuan yang optimal dalam mengurus rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber daya yang potensial yang ada di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena pertumbuhan mengindikasikan bahwa suatu daerah tersebut dapat dikatakan maju dan berkembang.

Kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting di antaranya oleh pertumbuhan ekonomi daerah serta Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Kehidupan perekonomian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi ini akan memacu peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan pendapatan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk makin giat membayar pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya Pendapatan Asli Daerah di suatu daerah akan menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik setiap tahunnya.

Fakta yang ada rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten di Propinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018? dan Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten di Propinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018?

2. Tinjauan Pustaka

1) Pertumbuhan Ekonomi

Suparmoko (2012) mendefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perluasan atau peningkatan dari *Gross Domestic Product* potensial/output dari suatu negara. Menurut Sukirno (2010) bahwa istilah pertumbuhan ekonomi menerangkan atau mengukur prestasi dari perkembangan dari suatu perekonomian, sedangkan dalam analisis makro ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara. Menurut Boediono (2009) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diprosikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Mardiasmo (2012) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita).

Abdul Halim (2014) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Abdul Halim

Edisi Oktober

dan M. Nasir (2009), Pendapatan Asli Daerah adalah “pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merujuk pasal 6 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disempurnakan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan UU Nomor 23 Tahun 2014), PAD adalah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Halim (2014) mengatakan kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Suhandha (2017) Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

2) Kerangka Pemikiran Teoritis dan Rumusan Hipotesis

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau yang lebih dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada “proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya. Krest D. Tolosang (2018) melakukan pengujian terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka hal ini mengindikasikan terdorongnya peningkatan pendapatan asli daerah. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tinggi. Hal ini disetujui oleh penelitian Renny Nur'ainy (2013). H1: Adanya pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Renny Nur'ainy (2013), Andri Yuliyanto (2018), Krest D. Tolosang (2018), dan Ulfa Nabila Cyntia (2018). Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lain karena PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan sehingga optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah semakin kecil ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Untuk melihat kemandirian daerah dapat dilihat dari rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan bantuan dari pemerintah ditambah pinjaman. Jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. H2: Adanya pengaruh signifikan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3. Metode Penelitian

1) Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan sampel *Sensus*. Pemilihan sampel berdasarkan metode *Sensus* yaitu semua populasi dijadikan sampel, karena sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh jumlah populasi yaitu 29 (dua puluh sembilan) kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Sampel penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah yang terdaftar di Bappeda, BPS, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Propinsi Jawa Tengah pada periode 2016 – 2018 dari seluruh anggota populasi. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 data pengamatan yang berasal dari 3 tahun.

2) Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

1. Pertumbuhan Ekonomi (X1), adalah Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan dengan Produk Domestik Regional Bruto. PDRB yaitu jumlah nilai produksi netto dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan daerah dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Mardiasmo (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan perekonomian daerah dari tahun ke

tahun berikutnya yang diproksikan dengan PDRB (proses kenaikan output per kapita).

2. Pendapatan Asli Daerah (X₂), Halim (2012) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pemungutannya didasari oleh peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cakupannya yaitu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan penurunan proporsi tingkat subsidi diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Variabel ini diukur melalui besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rupiah) yang diperoleh kabupaten pada setiap tahun anggaran.

Pengukuran variabel Pendapatan Asli Daerah dengan rumus: $PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah}$.

3. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y), Tingkat/Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Halim, 2012). Derajat kemandirian keuangan daerah diproksi dari rasio antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan APBD tahun yang sama dan dinyatakan dalam persen.

Tabel Kriteria Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Nilai Rasio	Kriteria
00,00% - 25,00%	Rendah Sekali
25,01% - 50,00%	Rendah
50,01%-75,00%	Sedang
75,01%-100.00%	Tinggi

Sumber: Halim (2014).

3) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data dari dokumen laporan realisasi APBD tahun 2016 - 2018. Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut telah diaudit oleh BPK-RI serta dapat diakses. Data tersebut diperoleh dari Dari laporan realisasi APBD tahun 2016 - 2018 dapat diperoleh data mengenai jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan data Produk Domestik Regional Bruto

Edisi Oktober

(PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dan pusat melalui website www.djpk.depkeu.go.id

4) Teknik Analisis

Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Di mana:

Y : Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

X1 : Pertumbuhan Ekonomi

X2 : Pendapatan Asli Daerah

α : Konstanta

β : Slope atau koefisien regresi

ε : Error.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan Tabel 1 mendeskripsikan bahwa jumlah tahun (N) ada sebanyak 87 data pengamatan. Dari 3 tahun penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi (X1) di 29 Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2016 sampai 2018 memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 2,54% dan 6,45% dengan rata-rata (*mean*) 5,3302% dan standar deviasi 0,721156%. Variabel pendapatan asli daerah (X2) di 29 Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2016 sampai 2018 memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar Rp 4,54 milyar dan sebesar Rp 87,3 milyar dengan rata-rata (*mean*) Rp 10,931 milyar dengan standar deviasi 9,6088 milyar. Penelitian ini membuktikan Kabupaten Semarang dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas dan jumlah penduduknya yang standar dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerahnya. Variabel Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y) di 29 Kabupaten se Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2016 sampai 2018 memiliki nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 0,01% dan sebesar 0,72% dengan rata-rata (*mean*) 0,1037% dengan standar deviasi 0.09566%.

Nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah selama tahun penelitian 2016 - 2018 memiliki nilai *standart deviation* (ukuran penyebaran data) lebih kecil dari *mean* (nilai rata-rata) masing-masing variabel, berarti hal ini menunjukkan bahwa disimpulkan distribusi data cenderung normal.

Transformasi Tabel 2 dengan menggunakan logaritma natural biasanya digunakan pada situasi dimana terdapatnya hubungan tidak linier antara variabel penjelas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Transformasi logaritma akan membuat hubungan yang tidak linier dapat digunakan dalam model linier. Selain itu, Transformasi logaritma dapat

Edisi Oktober

mengubah data yang pada awalnya berdistribusi menceng atau tidak berdistribusi normal menjadi atau mendekati distribusi normal.

Perhitungan logaritma dan komputersasi persamaan regresi berikut ini:

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = 0,017 + 0,000X_1 + 8,347EX_2 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa:

- Konstanta sebesar 0,017 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen atau variabel independen dianggap konstan, maka tingkat kemandirian keuangan daerah naik sebesar 0,017 persen.
- Koefisien regresi X_1 (pertumbuhan ekonomi) naik senilai 0,000 artinya apabila terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi senilai 1 satuan maka akan menaikkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 0,000 persen.
- Koefisien regresi X_2 (Pendapatan Asli Daerah) naik senilai 8,347E artinya apabila terjadi perubahan Pendapatan Asli Daerah senilai 1 satuan maka akan menaikkan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 8,347E persen.

Berdasarkan data-data pada tabel 3 dapat diperoleh penjelasan bahwa:

- Pengaruh pertumbuhan ekonomi (X_1) negatif tidak signifikan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $-0,112$ dengan nilai signifikansi $0,911$ karena nilai hasil analisis tersebut di atas 5% ($\alpha > 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis ditolak atau menerima H_a . Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif tidak signifikan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di 29 Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2018, karena nilai signifikansi pertumbuhan ekonomi sebesar $0,911 > 0,05$.
- Pengaruh pendapatan asli daerah (X_2) positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $14,036$ nilai signifikansi $0,000$, karena nilai hasil analisis tersebut di bawah 5% ($\alpha < 0,05$). Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau menolak H_a . Hal ini berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di 29 Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2018, karena nilai signifikansi pendapatan asli daerah sebesar $0,000 < 0,05$.

4.2. Pembahasan

1) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di 29 Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018

Penyataan hipotesis pertama diharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, tidak terbukti. Berdasarkan tabel hasil pengujian statistik (tabel 4.12) menunjukkan tingkat signifikan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,911$ yang berarti lebih besar dari tingkat signifikan $0,05$ ($0,911 > 0,05$). Hal ini membuktikan hasil penelitian bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 29 Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 sampai 2018.

Edisi Oktober

Secara teori, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Pembangunan ekonomi ini dapat ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan per kapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pertumbuhan barang dan jasa yang antara lain diukur dengan besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi maupun daerah kabupaten atau kota. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini (29 Kabupaten se Propinsi Jawa Tengah selama tahun 2016 – 2018) adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Daerah.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi bukan salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Tanggung jawab agen (pemerintah daerah) kepada prinsipal (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran tingkat kemandirian keuangan daerah. Karena pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan sarana dan prasarana tersebut didapatkan dari anggaran tingkat kemandirian keuangan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD. Dengan demikian, ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Biasanya bila pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan alokasi tingkat kemandirian keuangan daerahnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat tahun anggaran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan, hal ini diperlukan berhubungan dengan kenyataan adanya penambahan penduduk. Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi di samping dapat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, pada akhirnya juga akan berpengaruh pada pendapatan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka pada PDRB atas dasar harga konstan 2000 merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan (BPS, 2019).

Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, komunikasi, komposisi sektor industri, teknologi, pasar ekspor,

situasi perekonomian internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. Berdasarkan uraian tersebut disimpulkan semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian belum tentu akan mengakibatkan meningkatnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten tersebut.

Penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Krest D. Tolosang (2018) yang mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Tetapi penelitian ini bertentangan hasil penelitian Renny Nur'ainy (2013) yang mengatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di 29 Kabupaten pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2018

Penyataan hipotesis kedua diharapkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Berdasarkan tabel hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan pendapatan asli daerah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 ($0,000 < 0,05$). Berarti hal ini membuktikan hasil penelitian bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 - 2018.

Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian pendapatan asli daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan pemerintah pusat/provinsi, maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan dan daerah tersebut semakin leluasa mengakomodasikan kepentingan masyarakatnya tanpa muatan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah lebih besar dibandingkan dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman maka daerah tersebut sudah mandiri dari segi finansialnya sehingga pemerintah daerah bisa mengurangi pengalokasian dana perimbangan kepada daerah tersebut. Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman daerah serta bantuan pemerintah pusat/provinsi seperti DBH, DAU dan DAK maka daerah tersebut dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya karena daerah tersebut masih bergantung pada pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lain karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan sehingga optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan

Edisi Oktober

pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan.

Dengan ditetapkannya pertama UU Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah di daerah mendapat kewenangan riil yang lebih besar dalam mengatur dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (pembangunan ekonomi) di tingkat daerah yang sangat besar, misalnya pada bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan telah menjadi salah satu bagian utama kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, mengingat peranan Pendapatan Asli Daerah masih rendah dalam penerimaan APBD daerah kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia serta kemampuan manajemen sektor pendidikan di tingkat daerah masih sangat terbatas.

Meskipun proporsi Pendapatan Asli Daerah maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap anggaran cukup besar terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah oleh pemerintah. Peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2002).

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan asli daerah tidak memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih sering mengalami kendala, yaitu berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan asli daerah. Namun demikian pengembangan dan penggalian potensi Pendapatan asli daerah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, mengingat pendapatan asli daerah sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah, serta dapat berperan penting dalam rencana peningkatan kemandirian keuangan pemerintah daerah untuk tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi. Secara umum strategi untuk peningkatan pendapatan daerah dalam upaya untuk meningkat kemandirian keuangan daerahnya yaitu kemampuan administrator (SDM), kemampuan keuangan daerah, keadaan infrastruktur. Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas harus dilaksanakan dengan baik. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun

Edisi Oktober

daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2012).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Renny Nur'ainy (2013), Krest D. Tolosang (2018), Andri Yuliyanto (2018), dan Ulfa Nabila Cyntia (2018) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Tetapi penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Nyoman Trisna Erawati (2015) yang mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1) negatif tidak signifikan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $-0,112$ dengan nilai signifikansi $0,911$ karena nilai hasil analisis tersebut di atas 5% ($\alpha > 0,05$). Artinya peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya tingkat kemandirian keuangan daerah berdasarkan perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Penerimaan Daerah.
2. Pengaruh pendapatan asli daerah (X2) positif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Y), hal ini ditunjukkan dengan nilai t hitung $14,036$ nilai signifikansi $0,000$, karena nilai hasil analisis tersebut di bawah 5% ($\alpha < 0,05$). Hal ini disebabkan kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian pendapatan asli daerah, sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, bukan dari bantuan pemerintah pusat/provinsi, maka daerah dapat dikatakan mandiri secara keuangan.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim dan M. Nasir. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YKPN Yogyakarta.
- Abdul Halim. 2014. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Andri Yuliyanto. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bappeda & Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, *Jawa Tengah Dalam Angka (Jawa Tengah in Figures)*; Semarang, berbagai tahun.
- Boediono. 2009. *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4*. Yogyakarta: BPFE.

Edisi Oktober

- Ernawati. 2017. *Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah*. ISSN. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. Vol. 6, No. 2.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Kusufi. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Juli Panglima Saragih. 2008. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Krest D. Tolosang. 2018. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 18 No. 03. Manado: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Kuncoro, M. 2014. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- M. Suparmoko. 2012. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2012. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Munir. 2014. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Indeks.
- Nur'ainy, Renny. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kota Di Jawa Barat)*. Jurnal Proccesing PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil) Vol. 5. Jakarta: Universitas Gunadarma Jakarta.
- Nyoman Trisna Erawati. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung Periode 2009-2013*. e-Proccesing of Management: Vol. 2 No. 3. Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom.
- Rahardja Adi Sasmita. 2009. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*. Jsakarta: Mandala Manurung Jakarta.
- Rahmat. 2010. *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
-, 2014. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
-, *Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
-, *Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah*. Jakarta.
-, *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
-, *Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
-, *Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah*; Jakarta.

Edisi Oktober

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan Ke-6. Bandung: CV Alfabeta.
 Suhandi. 2017. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.
 Sukirno, Sadono. 2010. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
 Ulfa Nabila Cyntia. 2018. *Pengaruh Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Ciamis Tahun 2012-2016*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
 Uma Sekaran. 2012. *Research Method for Business, a Skill Building Approach*. (Terjemahan). John Wiley and Sons Inc, Third Edition.
www.djpk.depkeu.go.id

Lamparan

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	87	2.54	6.45	5.3302	.72155
X2	87	4.54E7	8.73E8	1.0931E8	9.60887E7
Y	87	.01	.72	.1037	.09566

Tabel 2
Rangkuman Hasil Analisis
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.017	.043		.405	.687
X1	.000	.008	-.007	-.112	.911
X2	8.347E-10	.000	.838	14.036	.000

a. Dependent Variable: Y

Tabel 3
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model	t	Sig.
1 (Constant)	.405	.687
X1	-.112	.911